

# Negara dan Kediktatoran: Perspektif Psikologi Sosial

Masita Utami, Mochammad Sa'id\*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: mohammad.sa'id.fppsi@um.ac.id

## Abstract

Leaders are almost always needed in a group or organizational situation, including a state, which has the purpose of making decisions. One style of leadership is authoritarian leadership. Leaders who embrace this leadership style are called dictators and the state or government led by dictators is called the dictatorship. However, empirical researches in psychology on dictatorship phenomena are still rarely done. Therefore, we expect this paper will encourage more empirical researches on this phenomenon in the field of psychology, especially social psychology. This article was written with a literature review approach from a variety of relevant sources: books, book chapters, review articles, and research articles. The perspective used is social psychological perspective because in our opinion it is more precise and comprehensive. The results of literature review show that dictatorship consists of three types: monarchic dictatorship, military dictatorship, and civilian dictatorship. The figure of a dictator in dictatorship state has narcissism trait classified in the Dark Triad characteristics. The dictatorship state has two main problems namely power-sharing and authoritarian control. Empirically, dictatorship practices have more negative than positive impacts on a state. In addition, dictatorship practices are also contrary to the nature of leadership should be played by a state leader.

**Keywords:** political leadership; dictatorship; authoritarianism; democracy; social psychology

## Abstrak

Pemimpin hampir selalu dibutuhkan dalam situasi kelompok atau organisasi, termasuk dalam sebuah negara, yang memiliki tujuan untuk membuat keputusan. Salah satu gaya kepemimpinan adalah kepemimpinan otoriter yang identik dengan kepemimpinan sewenang-wenang. Pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan ini disebut dengan diktator dan negara atau pemerintahan yang dipimpin oleh diktator disebut dengan kediktatoran. Namun demikian, penelitian empiris di bidang psikologi mengenai fenomena kediktatoran masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya riset-riset empiris di bidang psikologi, khususnya psikologi sosial, mengenai fenomena kediktatoran. Artikel ini ditulis dengan pendekatan telaah literatur (*literature review*) dari berbagai sumber yang relevan, baik itu berupa buku, *book chapter*, artikel telaah, maupun artikel penelitian. Perspektif yang digunakan adalah perspektif psikologi sosial karena dianggap lebih tepat dan komprehensif. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa kediktatoran terdiri dari tiga jenis, yaitu *monarchic dictatorship*, *military dictatorship*, dan *civilian dictatorship*. Sosok diktator dalam negara kediktatoran biasanya memiliki *trait* kepribadian narsisisme yang tergolong dalam karakteristik Dark Triad. Negara kediktatoran memiliki dua masalah utama yaitu *power-sharing* dan *authoritarian control*. Secara empiris, praktik kediktatoran memiliki lebih banyak dampak negatif daripada positif bagi sebuah negara. Selain itu, praktik kediktatoran juga bertentangan dengan hakikat kepemimpinan yang harusnya diperankan oleh seorang pemimpin negara.

**Kata kunci:** kepemimpinan politik; kediktatoran; otoritarianisme; demokrasi; psikologi sosial

## 1. Pendahuluan

Sebuah kelompok dapat berdiri tanpa adanya pemimpin, namun pemimpin tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya anggota (Forsyth, 2010). Meski demikian, tidak semua kelompok dapat berdiri tanpa adanya pemimpin. Pemimpin dibutuhkan untuk membuat keputusan dan aturan yang jelas pada kelompok dengan tugas yang lebih kompleks dan jumlah anggota yang banyak (Forsyth, 2010). Negara dapat disebut sebagai kelompok yang

memiliki tugas yang kompleks dan anggota yang banyak. Oleh karena itu, sebuah negara harus memiliki pemimpin.

Kepemimpinan sendiri memiliki berbagai makna (Forsyth, 2010). Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang tidak memaksa anggotanya untuk memperbaiki kualitas kelompoknya, namun proses membimbing anggotanya melalui cara mengorganisir, mengarahkan, mengoordinir, mendukung dan memotivasi usaha anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya proses yang satu arah antara pemimpin dan anggotanya, namun juga melibatkan situasi kelompok yang saling timbal balik satu sama lain yaitu antara pemimpin, anggota dan situasi kelompok.

Beberapa pemimpin dunia memiliki definisi yang berbeda terkait makna kepemimpinan (Forsyth, 2010). Misalnya, pemimpin Jerman Adolf Hitler yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan massa. Sedangkan George W. Bush dengan gaya kepemimpinan yang cenderung demokratis, mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah karakter yang mendengarkan anggotanya setiap saat serta menganggap kepemimpinan sebagai tugas dan kehormatan negara.

Berdasarkan definisi para pemimpin negara, gaya kepemimpinan sangat memengaruhi bagaimana pemimpin memaknai kepemimpinan itu sendiri dalam memimpin negaranya. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara pemimpin memengaruhi anggotanya (Luthans, 2002). Secara umum, terdapat tiga gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh setiap kelompok, yaitu *the authoritarian* (otoriter), *the democratic* (demokratis), dan *the laissez-faire* (permisif) (Forsyth, 2010).

Salah satu gaya kepemimpinan yang seringkali dianggap memiliki banyak dampak negatif adalah gaya kepemimpinan otoriter. *The authoritarian* (otoriter) adalah pemimpin yang berperan mutlak sebagai penentu, penguasa, dan pengendali dalam sebuah organisasi atau kelompok, baik dalam membuat keputusan maupun menentukan tugas anggotanya (Kartono, 2006; Nawawi, 2005). Pemimpin negara yang mengadopsi gaya kepemimpinan otoriter ini disebut dengan diktator. Sedangkan negara yang dipimpin oleh seorang diktator disebut dengan negara kediktatoran (*dictatorship state*). Data *World Population Review* (*World Population Review*, 2020) menunjukkan bahwa terdapat 50 diktator di seluruh dunia saat ini, seperti Kim Jong Un di Korea Utara, Hamad bin Isa Al Khalifa di Bahrain, dan Ashraf Ghani Ahmadzai di Afghanistan.

Riset-riset empiris mengenai kediktatoran dalam perspektif psikologi masih sangat sedikit. Sejauh ini, riset-riset empiris di bidang psikologi mengenai topik ini lebih banyak menggunakan kacamata psikologi kepribadian (Duckitt, 2015; Greene & Robertson, 2017; Nai, 2019; Nai & Toros, 2020). Oleh karena itu, tulisan ini mencoba melakukan telaah literatur (*literature review*) mengenai fenomena kediktatoran dalam perspektif psikologi sosial. Perspektif psikologi sosial ini dipilih bukan tanpa alasan. Fenomena kediktatoran, dalam pandangan kami, bukanlah sekedar fenomena individual, namun ia berjaln-kelindan dengan dinamika lingkungan sosial-politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, cara pandang psikologi sosial –yang mengkaji fenomena psikologis individu dalam relasinya dengan lingkungan sosialnya (Baron, R. A., & Branscombe, 2014; Hanurawan, 2012; Myers, 2002)- tentunya lebih tepat dan komprehensif. Penulis berharap tulisan ini dapat memicu

munculnya riset-riset empiris di bidang psikologi mengenai kediktatoran, khususnya yang menggunakan perspektif psikologi sosial.

## 2. Metode

Artikel ini ditulis dengan pendekatan telaah literatur (*literature review*) yang terdiri dari bagian pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan (Kysh, 2013). Telaah literatur merupakan jenis artikel ilmiah yang ditulis untuk membuat kesimpulan dan evaluasi mengenai topik tertentu (American Psychological Association, 2020; Kysh, 2013). Dalam mengulas fenomena kediktatoran, kami menggunakan berbagai literatur yang relevan, baik itu berupa buku, *book chapter*, artikel telaah (*review article*), maupun artikel penelitian (*research article*). Alasan penggunaan berbagai sumber literatur tersebut adalah karena minimnya riset-riset empiris mengenai kediktatoran di bidang psikologi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Definisi Kediktatoran

Kediktatoran sebagai sebuah istilah dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang tidak demokratis, dimana pengambilan keputusan tidak ditentukan oleh rakyat, melainkan oleh individu (pemimpin), elit politik, dan dewan yang memiliki hubungan dengan pemimpin serta oligarki (Ezrow & Frantz, 2011). Paul Brooker mengistilahkan kediktatoran sebagai sebuah tindakan mencuri jabatan pemerintahan dan kekuasaan negara (Ezrow & Frantz, 2011). Przeworski dkk. (Ezrow & Frantz, 2011) menjelaskan perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran. Dalam rezim demokrasi, pemimpin pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan dalam rezim kediktatoran pemimpin pemerintahan dipilih tanpa melalui pemilihan umum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kediktatoran adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter (*authoritarian*). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gaya kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang berperan mutlak sebagai penentu, penguasa, dan pengendali dalam sebuah organisasi atau kelompok, baik dalam membuat keputusan maupun menentukan tugas anggotanya (Kartono, 2006; Nawawi, 2005).

Praktik kediktatoran di berbagai negara biasanya dicirikan dengan kepemimpinan yang dipenuhi dengan kekerasan. kediktatoran yang dicirikan dengan kekerasan dan tindakan koersi lainnya untuk menumbukan rasa takut pada masyarakatnya ini disebut dengan "*old-style dictatorship*" atau kediktatoran gaya lama (Guriev & Treisman, 2015). Kediktatoran gaya lama ini masih digunakan di beberapa negara, misalnya Korea Utara. Kediktatoran gaya lama dapat mengambil salah satu atau gabungan dari 3 bentuk tindakan (Guriev & Treisman, 2015). Pertama, represi dengan kekerasan (*violent repression*), dimana pemimpin menggunakan cara kekerasan, ancaman, bahkan membunuh siapapun yang melawan kebijakannya. Namun negara yang menggunakan gaya ini semakin menurun dalam dekade terakhir. Kedua, indoktrinasi ideologi (*ideological indoctrination*), yaitu menyebarkan doktrin-doktrin pada masyarakatnya agar mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, dimana doktrin tersebut memunculkan rasa takut. Ketiga, memonopoli kekuasaan dengan membatasi kebebasan dalam segala aspek kehidupan negara, seperti hak kepemilikan, pers/media massa, dan kebebasan berpendapat.

Namun di era teknologi dan informasi ini, kediktatoran tidak hanya dicirikan dengan kepemimpinan yang dipenuhi dengan kekerasan. Dalam perkembangan sejarah, muncul

kediktatoran gaya baru yang menggunakan strategi manipulasi informasi agar seseorang melakukan sesuatu yang dianggap benar, seperti propaganda, *censorship*, dan kooptasi (Guriev & Treisman, 2015). Propaganda merupakan setiap upaya pemerintah untuk menyampaikan pesan yang meyakinkan publik bahwa sang pemimpin adalah orang yang kompeten. Sedangkan *censorship* mencakup setiap upaya untuk mempengaruhi dan bahkan mengintervensi seluruh saluran informasi, termasuk media massa, agar seluruh informasi yang muncul ke publik sesuai dengan kepentingan pemimpin. Adapun kooptasi merupakan upaya-upaya untuk mempengaruhi dan mengintervensi yang menyertai propaganda maupun *censorship* tanpa harus menggunakan kekerasan represif.

### 3.2. Jenis-Jenis Kediktatoran

Clark, Golder, dan Golder (Clark et al., 2017) membagi kediktatoran menjadi tiga jenis, yaitu *monarchic dictatorship*, *military dictatorship*, dan *civilian dictatorship*. *Monarchic dictatorship* adalah bentuk pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh seseorang yang mendapatkan kekuasaan melalui hubungan keluarga. Jenis kediktatoran ini cenderung lebih stabil dan bertahan lama, serta jarang menggunakan kekerasan dibandingkan jenis kediktatoran yang lain (Clark et al., 2017). Selain itu, pertumbuhan perekonomian dan kestabilan hak properti pada kediktatoran jenis ini lebih baik daripada jenis lainnya (Menaldo, 2012). Jenis kediktatoran ini memiliki aturan dan norma yang jelas mengenai pembagian keuangan negara, yaitu untuk anggota keluarga kerajaan sendiri (Clark et al., 2017).

*Military dictatorship* yaitu bentuk pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh seseorang yang menjabat sebagai angkatan bersenjata dan berdurasi lebih singkat (Clark et al., 2017). Kepemimpinan jenis ini menggunakan metode negosiasi daripada kekerasan untuk mengakhiri kepemimpinan. Selain itu, ia juga cenderung tidak kompetitif dibandingkan dengan jenis kediktatoran lainnya. Negosiasi yang dilakukan dalam penyerahan kekuasaan atau yang menjadi akhir kekuasaan dilakukan untuk melindungi kepentingan pemimpin diktator.

Jenis kediktatoran yang terakhir adalah *civilian dictatorship*, dimana pemerintahan otoriter dipimpin oleh seseorang tanpa adanya bantuan dari keluarga atau angkatan bersenjata, melainkan dibantu oleh rezim partai atau kultus pribadi (Clark et al., 2017). *Civilian dictatorship* memiliki dua jenis yaitu *dominant-party dictatorship* dan *personalistic dictatorship* (Clark et al., 2017). *Dominant-party dictatorship* adalah sebuah pemerintahan yang jabatan politik dan kontrol kebijakannya didominasi oleh satu partai, walaupun partai lain mungkin ada dan berkompetisi dalam pemilihan umum juga. Jenis kediktatoran ini bertahan lebih lama daripada *monarchic dictatorship*. Sedangkan *personalistic dictatorship* adalah sebuah pemerintahan yang jabatan politik dan kontrol kebijakannya didominasi oleh seorang diktator atas kendali pribadinya, walaupun seringkali didukung oleh partai politik atau militer (Clark et al., 2017). Kediktatoran jenis ini ditandai dengan kebijakan negara yang kuat dan rahasia, lemah atau bahkan tidak adanya peran pers, dan penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang agar masyarakatnya tunduk pada pemimpinnya. Salah satu contoh *personalistic dictatorship* adalah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (Clark et al., 2017).

### 3.3. Sosok Diktator dalam Negara Kediktatoran

Penelitian tentang kediktatoran dalam perspektif psikologi kepribadian telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemimpin dengan gaya kepemimpinan diktator rata-rata memiliki sifat-sifat (*traits*) yang dikelompokkan dalam *Dark Triad* (Greene & Robertson, 2017; Nai, 2019; Nai & Toros, 2020). Teori kepribadian *Dark Triad* ini merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu memiliki “sisi gelap” dalam dirinya, yang dicirikan oleh 3 sifat kepribadian: Narsisisme (*narcissism*), Machiavellianisme (*Machiavellianism*), dan Psikopati (*psychopathy*). Orang-orang yang memiliki ciri kepribadian ini seringkali dihubungkan dengan perilaku-perilaku yang buruk (*bad behaviour*).

Apabila ditelisik lebih jauh, ciri-ciri kepribadian *Dark Triad* meliputi 7 ciri khas (Greene & Robertson, 2017; Nai, 2019; Nai & Toros, 2020). Pertama, rendahnya kemampuan untuk bekerjasama dan menghindari konflik (*agreeableness*). Kedua, rendahnya sifat berhati-hati dan bertanggungjawab (*conscientiousness*). Ketiga, rendahnya kemampuan mengendalikan emosi (*emotional stability*). Keempat, tingginya sifat mudah bergaul dan bersosialisasi (*extraversion*). Kelima, tingginya kecintaan yang berlebihan terhadap diri sendiri (*narcissism*). Keenam, tingginya sifat antisosial, egois, dan tak berperasaan (*psychopathy*). Ketujuh, tingginya sifat licik, penipu, dan eksploitatif terhadap sesama (*Machiavellianism*).

Duckitt (Duckitt, 2015) mengemukakan pandangan yang berbeda mengenai sosok pemimpin dalam negara kediktatoran. Menurutnya, kepribadian otoriter dalam diri seorang pemimpin diktator merupakan gabungan dari 2 dimensi nilai dan sikap sosial, yaitu otoritarianisme sayap kanan (*right-wing authoritarianism/RWA*) dan orientasi dominasi sosial (*social dominance orientation/SDO*). Otoritarianisme sayap kanan merupakan nilai dan sikap sosial yang mencakup 3 ciri khas: kepatuhan pada nilai-nilai konvensional (*conventionalism*), ketundukan kepada figur otoritas kelompok yang diikuti (*authoritarian submission*), dan pembenaran agresi terhadap orang-orang yang melanggar nilai-nilai konvensional (*authoritarian aggression*). Sedangkan orientasi dominasi sosial merupakan orientasi sikap sosial secara umum terhadap hubungan antarkelompok, apakah lebih menyukai hubungan antarkelompok yang setara atau hierarkis.

### 3.4. Permasalahan dalam Kediktatoran

Pemerintahan otoriter atau *dictatorship* memiliki dua masalah utama, yaitu *power-sharing* dan *authoritarian control* (Svolik, 2012). Permasalahan *power-sharing* melibatkan adanya konflik di antara koalisi yang mendukung jabatan pemimpin. Konflik biasanya terjadi akibat pembagian kekayaan hingga kekuasaan antara diktator dan koalisi pendukungnya. Dalam hal pembagian kekuasaan, diktator menempatkan koalisi pendukungnya dalam jabatan-jabatan di bagian legislatif dan menyingkirkan partai oposisinya. Konflik ini selalu mengalami dilema, karena jika diktator membagi kekuasaannya sama rata dengan koalisi pendukungnya, maka kekuasaan yang dimiliki akan menurun dan sebaliknya.

Permasalahan utama yang kedua adalah *authoritarian control* yaitu konflik yang melibatkan elite politik dan massa (Svolik, 2012). Hal ini seperti yang terjadi pada kasus Mei 1998 di Indonesia, dimana terjadi konflik antara diktator (Presiden Soeharto) dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya agar masyarakat

mendapatkan kontrol dalam negara. Svolik (Svolik, 2012) menyatakan bahwa terdapat dua strategi yang dilakukan elite politik untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu dengan cara represi dan kooptasi. Represi dan kooptasi yang dilakukan pemerintah terjadi pada pemerintahan Soeharto di Indonesia, dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat terbatas (Saptono, 2005).

### 3.5. Dampak Kediktatoran bagi Negara dan Masyarakat

Pada kenyataannya, praktik kediktatoran memiliki lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Salah satu penelitian (Rizio & Skali, 2020) yang dilakukan pada 133 negara yang mengadopsi gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis dalam kurun waktu 1858 hingga 2010 menunjukkan bahwa negara yang menganut kediktatoran memiliki lebih banyak dampak negatif daripada positif, terutama di bidang perekonomian. Korea Utara, misalnya, yang dipimpin oleh Kim Jong Un memiliki tingkat perekonomian terendah di Asia Pasifik per 2020 (*The Heritage Foundation*, 2020). Penelitian-penelitian lain juga membuktikan bahwa kediktatoran memiliki dampak yang cenderung negatif bagi perekonomian sebuah negara, seperti tingginya inflasi, rendahnya GDP (*Gross Domestic Product*), dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Albertus & Gay, 2019; Gehlbach et al., 2016; Hollyer et al., 2019; Papaioannou & Van Zanden, 2015).

Tindakan yang dilakukan oleh seorang diktator, seperti menyebarkan rasa takut pada warganya, hanya akan menimbulkan efek kepatuhan (Guriev & Treisman, 2015; Moghaddam, 2013). Yang dimaksud kepatuhan (*obedience*) di sini adalah kesediaan warga negara untuk menuruti perintah pemimpin walaupun mereka sebenarnya tidak setuju dengan perintah tersebut (Kelman, 1958). Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa warga negara hanya akan mematuhi perintah tersebut jika dipantau dan sebaliknya.

Pemerintahan kediktatoran juga seringkali menggunakan represi dalam menyelesaikan masalahnya (Svolik, 2012). Hal ini membuat warganya tidak bebas untuk mengeluarkan pendapat sehingga membuat mereka kurang kritis. Padahal dalam suatu organisasi atau kelompok, tipe anggota yang efektif adalah *exemplary followers (stars)*, dimana anggota turut aktif dalam kegiatan kelompok, bersifat konstruktif, dan kritis (Forsyth, 2010). Hal inilah yang tidak didapatkan dalam negara kediktatoran karena warganya tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat atau berpikir kritis. Secara tidak langsung kediktatoran menghambat perkembangan pemerintahan karena warganya tidak memiliki pemikiran dan sikap yang konstruktif (Guriev & Treisman, 2015). Di sisi lain warga negara juga tidak bisa mengembangkan sikap kritis akibat tekanan yang diberikan pemimpin.

### 3.6. Kediktatoran dan Kepemimpinan

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kediktatoran memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dan dominasi untuk memengaruhi atau menguasai masyarakatnya. Dalam konteks negara, kekerasan dan dominasi yang digunakan oleh kepala negara bukanlah bentuk kepemimpinan yang baik (Forsyth, 2010). Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin seharusnya dilakukan dengan adanya izin dari warganya, bukan untuk mendominasi dan berbuat sewenang-wenang.

Proses timbal balik antara pemimpin, anggota, dan keadaan kelompok disebut sebagai makna dari hakikat kepemimpinan dalam suatu kelompok (Forsyth, 2010). Hal ini juga berlaku dalam konteks negara. Kepemimpinan dianggap tidak hanya berpusat pada pemimpin saja, namun juga melibatkan orang-orang di sekitarnya. Pemimpin dan warga negara saling memengaruhi satu sama lain. Tidak hanya pemimpin saja yang memengaruhi secara penuh warganya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kediktatoran tidak memenuhi makna kepemimpinan yang sebenarnya.

Kediktatoran gaya lama yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, pemaksaan ideologi, dan monopoli kekuasaan (Guriev & Treisman, 2015). Padahal dalam suatu kelompok, pemimpin yang layak haruslah menerima izin dari anggota untuk dapat menerapkan kekuasaannya di dalam kelompoknya (Forsyth, 2010). Pemimpin yang efektif memiliki orientasi pada hubungan antara anggota dan pemimpinnya. Dalam konteks negara, relasi ini terjadi antara pemimpin negara dan warganya.

Sedangkan dalam kediktatoran, orientasi tersebut tidaklah menjadi fokus. Dalam pemerintahan kediktatoran, pemimpin hanya berfokus pada bagaimana agar anggotanya patuh dan melakukan hal yang diinginkannya dengan berbagai cara, misalnya kekerasan, menyebarkan rasa takut, dan indoktrinasi ideologi (Guriev & Treisman, 2015). Hal ini juga menunjukkan bahwa kediktatoran bertentangan dengan hakikat kepemimpinan.

#### 4. Simpulan

Negara kediktatoran terdiri dari tiga jenis, yaitu *monarchic dictatorship*, *military dictatorship*, dan *civilian dictatorship*. Sifat *narcissism*, yang tergolong dalam kelompok karakteristik *Dark Triad*, merupakan sifat yang paling banyak dimiliki oleh pemimpin diktator dalam negara kediktatoran. Negara kediktatoran memiliki dua masalah utama yaitu *power-sharing* dan *authoritarian control*. Secara empiris, praktik kediktatoran memiliki lebih banyak dampak negatif daripada positif bagi sebuah negara. Selain itu, praktik kediktatoran juga bertentangan dengan hakikat kepemimpinan yang harusnya diperankan oleh seorang pemimpin negara.

#### Daftar Rujukan

- Albertus, M., & Gay, V. (2019). No better time than now: Future uncertainty and private investment under dictatorship. *Economics & Politics*, 31(1), 71–96. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12120>
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.)* (7th ed.). American Psychological Association.
- Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2014). *Social psychology* (13th ed.). Pearson Education.
- Clark, W. R., Golder, M., & Golder, S. N. (2017). *Principles of comparative politics*. CQ Press.
- Duckitt, J. (2015). Authoritarian personality. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2th ed., pp. 255–261). Elsevier. <https://doi.org/10.2307/3791588>
- Ezrow, N. M., & Frantz, E. (2011). *Dictators and dictatorships: Understanding authoritarian regimes and their leaders*. Bloomsbury Publishing USA.
- Forsyth, D. R. (2010). *Group dynamics* (5th ed.). Cengage Learning.
- Gehlbach, S., Sonin, K., & Svolik, M. W. (2016). Formal models of nondemocratic politics. *Annual Review of Political Science*, 19, 565–584. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042114-014927>
- Greene, S., & Robertson, G. (2017). Agreeable authoritarians: Personality and politics in contemporary Russia. *Comparative Political Studies*, 50(13), 1802–1834. <https://doi.org/10.1177/0010414016688005>

- Guriev, S., & Treisman, D. (2015). *How modern dictators survive: An informational theory of the new authoritarianism*. National Bureau of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w21136>
- Hanurawan, F. (2012). *Psikologi sosial: Suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2019). Why do autocrats disclose? Economic transparency and inter-elite politics in the shadow of mass unrest. *Journal of Conflict Resolution*, 63(6), 1488–1516. <https://doi.org/10.1177%2F0022002718792602>
- Kartono, K. (2006). *Pemimpin dan kepemimpinan*. RajaGrafindo.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.1177%2F002200275800200106>
- Kysh, L. (2013). What's in a name? The difference between a systematic review and a literature review and why it matters. *Poster Presented at Medical Library Group of Southern California & Arizona (MLGSCA) and the Northern California and Nevada Medical Library Group (NCNMLG) Joint Meeting, La Jolla, CA*. Retrieved from <Http://Libguides.Sjsu.Edu/c.Php>. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.766364>
- Luthans, F. (2002). *Organizational Behavior*. McGraw-Hill.
- Menaldo, V. (2012). The middle east and north Africa's resilient monarchs. *The Journal of Politics*, 74(3), 707–722. <https://doi.org/10.1017/S0022381612000436>
- Moghaddam, F. M. (2013). *The psychology of dictatorship*. American Psychological Association.
- Myers, D. G. (2002). *Social psychology*. McGraw-Hill.
- Nai, A. (2019). Disagreeable narcissists, extroverted psychopaths, and elections: A new dataset to measure the personality of candidates worldwide. *European Political Science*, 18(2), 309–334. <https://doi.org/10.1057/s41304-018-0187-2>
- Nai, A., & Toros, E. (2020). The peculiar personality of strongmen: Comparing the Big Five and Dark Triad traits of autocrats and non-autocrats. *Political Research Exchange*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2019.1707697>
- Nawawi, H. (2005). *Perencanaan SDM untuk organisasi profit yang kompetitif*. UGM Press.
- Papaioannou, K. J., & Van Zanden, J. L. (2015). The dictator effect: how long years in office affect economic development. *Journal of Institutional Economics*, 11(1), 111–139. <https://doi.org/10.1017/S1744137414000356>
- Rizio, S. M., & Skali, A. (2020). How often do dictators have positive economic effects? Global evidence, 1858–2010. *The Leadership Quarterly*, 31(3), 101302. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.06.003>
- Saptono, I. (2005). *Tidak bebas berekspresi: Kisah tentang represi dan kooptasi kebebasan berekspresi*. ISAI.
- Svolik, M. W. (2012). *The politics of authoritarian rule*. Cambridge University Press.
- The Heritage Foundation. (2020). 2020 Index of Economic Freedom. <https://www.heritage.org/index/country/northkorea?version=145>
- World Population Review. (2020). Dictatorship Countries Population. <https://worldpopulationreview.com/countries/dictatorship-countries/>